

BAB V

KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis mendalam terhadap isu Kurdi di Turki, penulis menarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan orientasi PKK dari menginginkan kemerdekaan menjadi *democratic autonomy* adalah karena dua hal, yaitu karena ditolaknya ideologi separatisme PKK oleh pemerintah Turki serta lemahnya oposisi internal PKK yang menentang perubahan ideologi dan restrukturisasi dalam tubuh PKK. Penolakan ide separatisme PKK oleh pemerintah Turki memaksa PKK untuk mencari alternatif perjuangan baru demi kebebasan etnis Kurdi di Turki. Sedangkan oposisi internal PKK yang lebih memilih melarikan diri dari PKK dibandingkan untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan Ocalan akhirnya membuat perubahan orientasi ini dapat terjadi tanpa adanya halangan dari dalam tubuh PKK.

Permasalahan Etnis Kurdi di Turki sebenarnya bukanlah isu baru, melainkan isu lama yang mulai mengalami eskalasi ketika Republik Sekuler Turki berdiri. Etnis Kurdi yang mayoritas merupakan muslim Sunni tidak setuju dengan kebijakan sekular dan turkifikasi pemerintah Republik Turki yang baru di bawah kekuasaan Mustafa Kemal Ataturk. Kuatnya nilai kebudayaan dalam masyarakat Kurdi membuat mereka menolak dengan keras kebijakan Ataturk. Belum lagi, pada perjanjian Sevres antara dinasti Ottoman dengan sekutu terdapat isyarat bagi bangsa Kurdi untuk bisa mendapatkan hak mengatur diri mereka sendiri. hal

inilah yang kemudian menjadi dasar resistensi atas nama nasionalisme Kurdi terhadap diskriminasi pemerintah Turki.

Di tengah-tengah perjuangan ini, lahirlah sebuah kelompok Kurdi yang didirikan atas pertemuan Abdullah Ocalan dan teman-temannya. Pertemuan ini sampai pada keputusan membentuk organisasi yang diberi nama *Partiya Karkeren Kurdistan* (PKK) atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Kurdistan Worker's Party*. PKK merupakan satu-satunya aktor revolusioner Kurdi yang paling menarik perhatian dibandingkan dengan pemberontakan-pemberontakan Kurdi sebelumnya. Karena dianggap sebagai satu-satunya pihak yang bisa menjadi perwakilan etnis Kurdi, maka PKK mulai mendapatkan dukungan dari simpatisan Kurdi, baik itu yang berada di bumi Kurdistan ataupun mereka yang telah berdiaspora ke luar Kurdistan.

Sebagai organisasi dengan ideologi Marxis-Leninis, PKK memiliki tujuan untuk mendirikan sebuah negara Kurdistan yang merdeka di Turki atas dasar nilai-nilai sosialis. Dengan gaya kepemimpinan yang terpusat pada Ocalan, PKK akhirnya memilih untuk melakukan perjuangan bersenjata melawan pemerintah Turki. Perjuangan ini dimulai dengan menghapuskan sistem kesukuan dan tuan tanah yang membuat penduduk lokal Kurdi menderita. Hasilnya, serangan terhadap tuan tanah ini berhasil membuat PKK mendapat dukungan dari masyarakat lokal. Dari sinilah PKK mulai merencanakan gerakan baru yang lebih besar, yaitu melakukan perang gerilya melawan pemerintah Turki. Akan tetapi, rencana ini jelas mendapatkan penolakan dan perlawanan dari pemerintah Turki.

Konflik antara militan PKK dan pemerintah Turki telah berlangsung setidaknya dari tahun 1984 hingga 1999. Pada akhir tahun 1999, PKK yang saat

itu bermarkas di perbatasan wilayah Iraq mulai melemah akibat dari kebijakan konter-teroris lintas batas yang dilakukan pemerintah Turki. Puncaknya, pada tahun 1999 ketika pemimpin besar PKK, Abdullah Ocalan berhasil diculik oleh intelejen Turki atas bantuan dari AS di Kenya. Penangkapan ini merupakan pukulan telak bagi PKK yang kemudian juga menjadi awal mula perubahan organisasi ini.

Selain berhasil lolos dari vonis hukuman mati, Ocalan pada kenyataannya juga masih mampu mengendalikan PKK dari dalam penjara melalui pengacaranya. Hal inilah yang membuat PKK tidak hancur ditengah kekacauan dan kebingungan yang dialami anggotanya paska penangkapan Ocalan. Ocalan sendiri tidak hanya diam di dalam penjaranya. Sebaliknya, Ocalan melakukan perenungan dan evaluasi terhadap taktik yang dipakai PKK selama ini hingga dia sampai pada kesimpulan bahwa semua perjuangan kekerasan yang mereka lakukan tidak melahirkan apa-apa kecuali kesia-siaan. Dalam perenungannya, Ocalan berusaha untuk memperbaiki kesalahan PKK ini hingga dia akhirnya akrab dengan buku-buku seorang *eco-anarchist* asal New York yang bernama Murray Bookchin.

Ocalan memiliki ketertarikan dengan ide Murray Bookchin tentang *ecology* dan *comunalism*. Tidak lama setelah itu, Ocalan akhirnya terinspirasi dengan pemikiran Bookchin dan mulai mengembangkan pemikirannya sendiri dengan mengadopsi pemikiran Bookchin. Hasilnya adalah sebuah konsep baru yang diberinya nama *democratic confederalism*, sebuah konsep yang menolak negara bangsa dan berpendapat bahwa semua kebijakan harus berdasarkan dari rakyat. Konsep ini jelas bertentangan dengan tujuan awal PKK sehingga

melahirkan beberapa penolakan dari internal PKK. Namun, lemahnya oposisi internal ini pada akhirnya membuat Ocalan mampu melaksanakan ide barunya.

Berubahnya pemikiran Ocalan yang awalnya menginginkan kemerdekaan bagi etnis Kurdi di Turki menjadi keinginan untuk menerapkan *democratic confederalism* ini selanjutnya diikuti dengan restrukturisasi organisasi PKK itu sendiri. Ini adalah bentuk nyata dari keinginan Ocalan untuk mengaplikasikan pemikiran barunya, disamping beberapa alasan lain yang membuat organisasi PKK mulai kehilangan arah. Singkatnya, meskipun dengan sedikit penolakan dari anggotanya, Ocalan menyerukan untuk mengganti nama PKK menjadi KADEK pada tahun 2002 dan mulai fokus di jalan politik untuk menyuarakan aspirasi etnis Kurdi. Namun karena beberapa alasan seperti tidak adanya respon yang baik dari pemerintah Turki, KADEK akhirnya kembali dirubah menjadi KKK tidak lama setelah dibentuk.

Perubahan struktur PKK ini kemudian dilanjutkan pada tahun 2005, dimana Ocalan kembali menyerukan untuk dibentuk sebuah kongres yang akan memayungi semua etnis Kurdi, tidak hanya di negara Turki melainkan di wilayah Kurdistan lainnya. Kongres ini kemudian diberi nama *Koma Civaken Kurdistan* (KCK). KCK selanjutnya menjadi ujung tombak yang baru bagi PKK dalam mencapai tujuan baru mereka. Melalui KCK inilah didapatkan ide untuk membentuk *democratic autonomy* di empat wilayah Kurdistan. Hal ini ditindaklanjuti dengan adanya pembentukan *draft* oleh DTK yang merupakan organisasi payung KCK yang beroperasi di Kurdistan Utara, Turki.

Hingga akhirnya pada tahun 2015 yang lalu, DTK telah merumuskan sebuah keputusan yang diberi nama "*Declaration of political resolution regarding*

self-rule” yang di dalamnya berisi 14 poin penting mengenai langkah yang harus diambil KCK dalam mewujudkan *democratic autonomy* di wilayah Kurdistan. Hal ini sekaligus menjadi bukti dari perubahan orientasi PKK itu sendiri yang saat ini telah membuang keinginan untuk merdeka dan menggantinya dengan keinginan untuk mendapatkan hak mengatur diri mereka sendiri melalui ide yang mereka sebut sebagai *democratic confederalism*.

Pada akhirnya, penulis berharap penelitian ini akan menjadi sebuah sumbangan pemikiran yang selanjutnya bisa digunakan sebagai acuan dalam mendalami perubahan orientasi dan tujuan PKK dalam memperjuangkan hak-hak etnis kurdi di Turki. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis serta dapat menjadi bahan bagi penelitian – penelitian selanjutnya.